



IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DESA DALAM
UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA PASAR BINANGA

Oleh

Andre Chovado¹, Febri Yuliani², Iqbal Miftakhul Mujtahid³

¹Program Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia

Email: ¹chovadoandre@gmail.com, ²febri.yuliani@lecturer.unri.ac.id,
³iqbal@ecampus.ut.ac.id

Abstract

The Implementation of the SDG program by the Village Government is carried out through the implementation of village development planning documents. The aim of this research is to analyze how the implementation of the SDG program in village development planning. Data analysis includes analysis of work plans, financial allocations, program implementation report and the impact of changes on social, economic and environmental aspects of the village. This research uses a qualitative method with an exploratory approach and data collection through interview techniques and documentation studies. The result of this research show that 14 of the 17 SDG programs have been implemented in Pasar Binanga Village through various infrastructure development programs, community empowerment and strengthening activities. There has been increase in the economy, health levels and sustainable use of the environment in Pasar Binanga Village. Community participation and the competence of the village head are the strongest factors in supporting the implementation of SDG policies in Pasar Binanga Village. However, obstacle to the policy implementation are the lack of empowerment program from the Regional Government and several central policies that are binding on village budget allocation obligations.

Keywords: Sustainable Development Goals Desa, Kemandirian Desa

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals atau SDGS merupakan program yang dikembangkan oleh PBB berdasarkan program Millenium Development Goals (MDGS). Program ini memuat tujuan dan target pembangunan yang ingin dicapai dalam menangani isu strategis yang dihadapi oleh banyak negara di dunia (Triatmanto, 2021). SDGS memuat 4 aspek yang kemudian dijabarkan ke dalam 17 indikator (Fardhlu Risky & Mashur, 2022). Program ini difokuskan untuk mengentaskan kemiskinan serta memberdayakan perekonomian masyarakat bawah secara nasional maupun daerah (Triatmanto, 2021).

Pada tingkat desa, kebijakan SDGS diturunkan dan diberi nama SDGS Desa melalui serangkaian peraturan kementerian. Namun demikian, sejak diberlakukannya program SDGS Desa di tingkat Pemerintahan Desa masih belum mampu untuk memaksimalkan target pencapaian SDGS Desa itu sendiri (Triatmanto, 2021). Hambatan terjadi di lingkup Pemerintahan Desa baik secara eksternal maupun internal. Tingkat kompetensi perangkat desa yang rendah, komunikasi yang tidak efektif, kurangnya partisipasi masyarakat, dan rendahnya kemampuan pendamping desa menyebabkan pencapaian tujuan SDGS Desa menjadi terhambat (Hasibuan, 2022). Permasalahan



kemiskinan saat ini merupakan isu strategis yang dapat diatasi melalui program SDGS ini (Triatmanto, 2021). Berdasarkan data BPS Kabupaten Padang Lawas kemiskinan masih terletak di angka 7,89% atau 24.510 jiwa (BPS, 2024). Sementara itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas menyebutkan masih tingginya angka keluarga penerima bantuan sosial masih cukup tinggi. Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Angka Kemiskinan Kabupaten Padang Lawas

Tahun	Rata-rata Pendapatan per bulan/rupee	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
2019	332.350	23.170	8,28
2020	367.932	23.870	8,37
2021	388.404	25.780	8,69
2022	418.610	24.480	8,05
2023	449.217	24.510	7,89

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa perkembangan kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas cenderung konstan dan rentan untuk bertambah. Faktor seperti kenaikan harga barang dan rendahnya daya beli masyarakat pasca pandemi Covid 19 semakin memperparah kondisi tersebut. Ini menandakan aspek ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Padang Lawas masih cukup rendah.

Program pengentasan kemiskinan seperti SDGS Desa dapat dioptimalisasikan karena secara administrasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 17 kecamatan, 1 kelurahan dan 303 desa. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Padang Lawas berdomisili di pedesaan. Dengan demikian, melalui penggunaan dana desa ini pelaksanaan program SDGS Desa dapat dilakukan (Mazzucato, 2023) dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan membentuk kemandirian desa dapat menjadi salah satu opsi program yang dilakukan.

Tabel 2. Tingkatan Kemandirian Desa Kabupaten Padang Lawas

No	Kategori Desa	Jumlah pada Tahun 2023
1	Mandiri	1
2	Maju	9
3	Berkembang	202
4	Tertinggal	87
5	Sangat Tertinggal	4
	Total Desa	303

Data tabel 2 yang didapatkan melalui Kementerian Desa dan PDTT menunjukkan perkembangan kemandirian desa di Kabupaten Padang Lawas. Terdapat 1 desa yang merupakan desa mandiri yaitu Desa Pasar Binanga yang terletak di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

Berdasarkan uraian data di atas, maka untuk melihat bagaimana Pemerintah Desa melakukan implementasi SDGS Desa dalam membentuk kemandirian desa dan mengentaskan masalah kemiskinan dapat dilihat melalui desa yang memiliki status sebagai desa mandiri. Dengan kata lain, analisis implementasi SDGS yang ditemukan pada Desa Pasar Binanga dapat menemukan bagaimana implementasi SDGS Desa dilaksanakan dan menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kebijakan SDGS Desa Pasar Binanga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan eksplorasi. Sumber informasi primer yang didapatkan melalui wawancara dihubungkan dengan data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumentasi dari dokumen perencanaan pembangunan desa dan dokumen lain yang relevan. Data yang didapatkan kemudian dianalisis melalui model interaktif kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2013).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kondisi di lapangan terdapat upaya yang sangat baik yang dilakukan di Desa Pasar Binanga pada perencanaan pembangunan desa dalam upaya melaksanakan program SDGS Desa. Partisipasi masyarakat yang tinggi dan perilaku pejabat penguasa merupakan faktor yang paling mempengaruhi proses implementasi kebijakan ini. Perencanaan pembangunan dilakukan atas dasar kebutuhan masyarakat, kondisi dan potensi yang terdapat dalam lingkungan desa. Dalam penerapannya ke dalam program SDGS, Pemerintah Desa Pasar Binanga berdasarkan 3 tahun anggaran terakhir telah mengalokasikan anggaran desa ke dalam program yang mendukung target capaian SDGS.

Tabel 3. Alokasi Anggaran Program SDGS

Tahun	Anggaran Desa	Alokasi SDGS	Persen
2022	1.258.303.720	940.851.040	74,7%
2023	977.500.720	565.021.640	57,8%
2024	1.260.661.720	920.665.000	73,1%

Tabel 3 menjelaskan besaran anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan berkelanjutan setidaknya melebihi setengah dari anggaran desa secara keseluruhan setiap tahunnya. Anggaran diluar hal tersebut digunakan untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan perangkat desa. Dengan kata lain, hampir seluruh anggaran desa digunakan untuk melaksanakan program SDGS di Desa Pasar Binanga. Data dilapangan menyebutkan bahwa dari 17 indikator kebijakan SDGS, Desa Pasar Binanga telah mengalokasikan anggaran desa ke dalam 13 indikator yang ada. 4 indikator yang tidak dianggarkan masih memiliki kendala yaitu ketidaksesuaian indikator dengan potensi dan kondisi yang ada di desa, beberapa program juga masih

memerlukan tingkat perencanaan yang baik sebelum dapat dilaksanakan.

Tabel 4. Alokasi Anggaran pada Indikator SDGS

Nomor Tujuan SDGS	Anggaran
Poin 1	423.355.000
Poin 2	209.600.000
Poin 3	165.179.040
Poin 4	51.300.000
Poin 5	65.300.000
Poin 6	0
Poin 7	0
Poin 8	946.380.820
Poin 9	424.676.820
Poin 10	0
Poin 11	45.966.000
Poin 12	29.500.000
Poin 13	34.000.000
Poin 14	0
Poin 15	31.300.000
Poin 16	5.300.000
Poin 17	0

Poin 8 Perekonomian Desa Merata memiliki alokasi anggaran yang paling besar di antara tujuan SDGS yang lain. 4 tujuan SDGS yang tidak dianggarkan seperti Poin 7 Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan harus memiliki perencanaan yang baik sebelum dilaksanakan, Poin 10 Desa tanpa Kesenjangan tidak dianggarkan karena perekonomian masyarakat desa cukup tinggi, Poin 14 Desa Peduli Lingkungan Laut tidak sesuai dengan kondisi desa yang mayoritas daratan dan tidak memiliki laut, poin terakhir Poin 17 Kemitraan untuk Pembangunan Desa hingga saat data dikumpulkan desa masih belum menemukan mitra desa yang cukup strategis untuk dilakukan kerja sama antar satu sama lain.

Program SDGS dilaksanakan dalam bentuk program pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian terbagi lagi ke dalam berbagai jenis kegiatan yang dilaksanakan. Namun demikian, Pemerintah Desa memaksimalkan pemanfaatan potensi desa dengan banyak melaksanakan



pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan dimaksud untuk menunjang aktivitas perekonomian dan sekaligus memelihara lingkungan secara berkelanjutan. Mayoritas penduduk desa berprofesi sebagai petani dan pekebun tanaman sawit dan karet. Namun jumlah petani sawit merupakan yang paling banyak.

Tabel 5. Kelompok Program SDGS

Jenis	Anggaran
Pembangunan	1.328.543.640
Pembinaan	589.059.040
Pemberdayaan Masyarakat	471.035.000

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa mayoritas anggaran dalam penerapan program SDGS banyak dilakukan melalui pembangunan infrastruktur. Sebanyak 1.328.543.640 Rupiah dana yang dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur. Namun tidak hanya menggunakan anggaran desa, Kepala Desa mampu menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah lain sehingga Desa Pasar Binanga mendapatkan program bantuan berupa pembangunan sumur bor pada 37 titik oleh Dinas PUPR Pemprov Sumatera Utara pada tahun 2019 dan pembangunan toilet oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas. Bantuan ini mendukung tujuan SDGS Poin 6 Desa dengan Air Minum dan Sanitasi aman.

Jenis pembangunan yang dilaksanakan pada tiga tahun terakhir adalah pembangunan dan pembukaan jalan desa ke area perkebunan masyarakat, alur drainase di lingkungan pemukiman warga dan pemeliharaan jembatan kecil. Infrastruktur dasar tersebut sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka dalam proses perkebunan. Dengan adanya akses jalan yang baik sejauh \pm 3000 meter, biaya panen sawit menjadi lebih rendah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kualitas hasil perkebunan masyarakat desa, pelestarian adat istiadat dan kegiatan sosial desa

serta peningkatan kapasitas perempuan desa. Perekonomian masyarakat yang meningkat dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 6. Jumlah Program Keluarga Harapan Desa Pasar Binanga

Tahun	Jumlah
2020	87 KK
2023	22 KK

Berdasarkan Tabel 6 menjelaskan program-program yang dilaksanakan memberikan dampak perubahan terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan menurunnya jumlah Program Keluarga Harapan atau kategori masyarakat miskin maka menandakan bahwa tingkat perekonomian masyarakat Desa Pasar Binanga semakin meningkat. Rata-rata pendapatan masyarakat saat ini berkisar antara 4-6 juta rupiah per bulan. Pembangunan jalan akses menuju area perkebunan masyarakat sangat memberikan dampak yang positif diimbangi dengan stabilnya harga sawit.

Aspek lingkungan mengalami peningkatan yang sama. Hal tersebut ditandai dengan data angka stunting di Desa Pasar Binanga per tahun 2024 ini sudah menyentuh 0%. Penggunaan air tanah melalui pembangunan sumur bor dan sanitasi yang sudah baik memberikan dampak yang positif karena penggunaan air sungai yang tercemar bakteri dengan kotoran merupakan penyebab utama stunting pada anak-anak. Dengan demikian adanya pembangunan infrastruktur seperti sumur bor dan toilet umum memberikan dampak yang positif terhadap penggunaan lingkungan desa secara berkelanjutan.

Diantara 17 indikator SDGS yang dilaksanakan melalui beberapa program pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, aspek ekonomi dan aspek



lingkungan menjadi prioritas peningkatan dalam 3 tahun terakhir di Desa Pasar Binanga. Pelaksanaan dari berbagai macam program kegiatan yang dilaksanakan sangat mendukung tujuan utama program SDGS secara nasional. Akan tetapi, program pemberdayaan masyarakat masih belum memberikan dampak kepada ketiga aspek SDGS secara nyata. Hal tersebut perlu mendapatkan pertimbangan perbaikan dan evaluasi ke depannya. Dengan capaian perkembangan desa seperti ini memungkinkan akan meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan SDGS secara nasional.

Berdasarkan data yang ada terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat selama proses penerapan kebijakan SDGS Desa. Faktor pendukung pada implementasi kebijakan ini adalah tingginya partisipasi masyarakat dan kompetensi yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam memahami dan melaksanakan tugas. Sementara faktor penghambatnya adalah adanya kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan persyaratan pencairan anggaran, rendahnya program pemberdayaan masyarakat dari Pemerintahan Daerah dan rendahnya pemahaman masyarakat terkait dengan kebijakan SDGS Desa.

Berdasarkan fenomena tersebut maka Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa memiliki posisi sentral dan strategis dalam proses pembangunan desa. Kepala Desa merupakan individu yang harus mampu berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat desa. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan secara berkelanjutan di desa. Tingkat kompetensi yang dimiliki Kepala Desa akan menentukan tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan penerapan kebijakan ataupun peraturan di desa. Kepala Desa yang kompeten memiliki pemahaman yang lebih baik dan dapat menyadari pentingnya kebijakan bagi kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu peran Pemerintah

Daerah juga dibutuhkan, dalam menjaga kualitas pendidikan masyarakat sehingga menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompeten.

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan program kebijakan SDGS Desa di Desa Pasar Binanga terlaksana dengan baik melalui program pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagian besar program berdampak kepada aspek ekonomi dan lingkungan desa. Desa Pasar Binanga telah melaksanakan 13 dari 17 tujuan SDGS, 4 tujuan SDGS belum terlaksana dikarenakan adanya kondisi yang tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Tujuan SDGS nomor 8 yaitu Pertumbuhan Ekonomi Desa yang merata merupakan tujuan SDGS yang memiliki alokasi dana yang paling besar diantara tujuan SDGS lainnya. Pembangunan infrastruktur merupakan program yang paling banyak dilakukan dalam mencapai tujuan SDGS di Desa Pasar Binanga.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan SDGS Desa di Desa Pasar Binanga telah meningkatkan aspek perekonomian dan aspek lingkungan desa secara berkelanjutan karena kemampuan Kepala Desa dalam memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan aspirasi yang membangun. Selain itu, kemampuan Kepala Desa juga dapat menemukan peluang yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tingkat partisipasi masyarakat dan kompetensi Kepala Desa teridentifikasi sebagai faktor pendukung proses implementasi SDGS di Desa Pasar Binanga. Sementara itu, berdasarkan data di lapangan faktor penghambat implementasi kebijakan SDGS di Desa Pasar Binanga adalah adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait prioritas alokasi penggunaan dana desa yang cukup mengikat, rendahnya peran Pemerintah Kabupaten terhadap program pemberdayaan dan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program SDGS desa.



Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih diucapkan sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penulisan artikel ini. Diharapkan artikel yang telah diterbitkan dapat memberikan pencerahan dan landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aziz, I. (2019). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Universitas Sriwijaya Repository.
- [2] Azzahro, F., Ardhanariswari, R., Amalia, S.D., Haryanto, T., Wardaya, M.K., & Asyik, N. (2023). Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Program: Implementation and Obstacle in Kedung Banten, Banyumas. Atlantis Press. 121-133.
- [3] BPS. (2024). Kabupaten Padang Lawas dalam Angka 2024 (1st Edition). BPS.
- [4] Diah, A., & Syawie, M. (2015). Pembangunan Kemandirian Desa melalui Konsep Pemberdayaan Suatu Kajian dalam Perspektif Psikologi. Puslitbang Kesejahteraan Sosial, 175-188.
- [5] Fardhlu Rizky, M., & Mashur, D. (2022). Penerapan Sustainable Development Goals Desa di Desa Perkebunan Sungai. Ilmiah Wahana Pendidikan. 385-394.
- [6] Febriani, R., & Samudra, S. (2023). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Sebagai Upaya Menuju Kemandirian Desa Kota Rindau. Jurnal Ilmiah Publika. 367-344.
- [7] Grindle, M.S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey: Princeton University Press.
- [8] Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Makassar: De La Macca.
- [9] Hasibuan, R. (2022). Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 ayat 3 tentang Tugas Pendamping di Desa Batang Bulu Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas. Etheses.
- [10] Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press.
- [11] Knoepfel, P., Larrue, C., Varone, F., & Hill, M. (2007). Public Policy Analysis. United Kingdom: The Policy Press University of Bristol.
- [12] Mazzucato, M. (2023). Financing the Sustainable Development Goals through Mission Oriented Developments Banks. United Nation Departement of Economic and Social Affairs.
- [13] Miles, M., Hubberman, M., & Saldana, J. (2013). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Third Edition. Arizona: Sage Publications.
- [14] Sugandi, I., Abdoellah, O., & Gunawan, B. (2023). Achievement of SDGS Desa in Villages Planning and Budgeting Documents. Conference on Sustainability Science.
- [15] Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kebijakan. Bandung: Alfabeta.
- [16] Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [17] Suwitri, S., Hayu, I., & Warsono, H. (2016). Teori Administrasi. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- [18] Tahir, A. (2020). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.
- [19] Triatmanto, B. (2021). Menggagas Percepatan Pencapaian Sustainability Development Goals (SDGS) dengan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Malang: SELARAS.
- [20] Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS